

# Eksistensi Elite Politik di Palembang Tahun 1945-1950

Oleh Drs. Alian, M. Hum

## Abstrak

Tulisan ini menguraikan eksistensi elite politik di Palembang tahun 1945-1950. Elite politik dalam tulisan ini merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam aktifitas politik untuk berbagai tujuan, seperti kepentingan politik, pemerintahan dalam Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan sejarah di Indonesia yang sebelumnya dijajah Jepang, namun akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Tidak lama dari itu bangsa Indonesia dapat memproklamkan kemerdekaan, sejak itulah muncul elite-elite politik yang berperan mengisi bidang-bidang dalam pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu terdapat elite-elite politik yang berkerjasama dengan bangsa Belanda dalam mendukung Belanda mendirikan negara federal.

## PENDAHULUAN

Kondisi awal paska proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti terlambatnya berita proklamasi ke daerah-daerah. Masyarakat Palembang baru merasakan kebenaran kemerdekaan Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1945, setelah kelompok eks Perwira Gyu Gun mengibarkan bendera merah putih di kantor Waterleiding (sekarang menjadi kantor wali kota Palembang). Meskipun Indonesia sudah merdeka, situasi politik belum menentu, bangsa Jepang masih ada, para pemimpin belum terbentuk. Pada saat seperti ini menurut Kartodirdjo (1983:VII) adalah masa transisi, setiap bangsa yang sedang mengalami transisi akan menunjukkan pola perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai gejala dan masalah-masalah khusus yang berkenaan dengan situasi geografis, ekonomi dan politik. Masa transisi biasanya akan melahirkan perubahan struktur masyarakat yang menyangkut kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan dalam menentukan arah dan gerak perubahan tersebut, mereka adalah golongan sosial terkemuka (elite). Kelompok elite biasanya menunjukkan pada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani masyarakat di mana ia berada dengan cara-cara mereka sendiri.

Kemerdekaan Republik Indonesia adalah titik awal terjadinya perubahan dalam komposisi yang digerakan orang-orang yang berpengaruh. Perubahan ini meliputi birokrasi

pemerintahan, ekonomi, transportasi dan pendidikan. Hal ini sudah barang tentu melahirkan struktur-struktur sosial baru menggantikan struktur lama, serta menciptakan komposisi baru. Setiap masyarakat terdapat kelompok-kelompok elite, yaitu orang-orang yang mempunyai pengaruh, beberapa kelompok elite ini mempunyai peranan yang sangat berarti bagi masyarakat. Pendapat, keputusan dan tindakan mereka mempunyai akibat yang penting dan menentukan. Kedudukan mereka bisa berubah sesuai dengan situasi dan dengan siapa mengadakan interaksi. Pola interaksi ini dapat berbentuk kerjasama, kompetisi, bahkan mengarah pada konflik (Masyhur, 1988:12).

Elite politik dalam tulisan ini merujuk pada pengertian elite politik yang dikemukakan oleh Van Niel (1984: 12), menurutnya elite politik adalah orang-orang Indonesia yang terlibat di dalam aktifitas politik untuk berbagai tujuan tetapi yang biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Munculnya elite politik biasanya sesuai dengan situasi politik pada saat itu, para elite muncul dengan tiba-tiba tanpa ditentukan struktur sosial atau statusnya dalam masyarakat. Elite di sini menunjuk pada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani orang lain.

Berkaitan judul tulisan ini yaitu eksistensi elite politik di Palembang tahun 1945-1950. Maka dalam tulisan ini akan dicoba membicarakan kelompok-kelompok sosial yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan politik di Sumatera Selatan di awal-awal terbentuknya Republik. Gejala sosial di Palembang ketika itu muncul golongan-golongan yang berperan dalam menentukan arah kehidupan bangsa. Perubahan ini digerakan oleh golongan-golongan terkemuka (elite). Mereka adalah kelas politik atau elite politik yang memerintah, yang menduduki pos-pos koomando politik serta langsung mempengaruhi beberapa keputusan guna mencapai tujuan. Dengan demikian daerah jangkauannya meliputi bidang pemerintahan dan kemiliteran. Sumber data tulisan ini sebagian besar penulis ambil dari tulisan penulis sendiri yang telah terhimpun dalam tesis, yang disesuaikan dengan masalah pada judul ini terutama menyangkut elite-elite politik yang berperan pada masa revolusi (Alian, 2000).

## MUNCULNYA ELITE POLITIK

Sebagaimana telah penulis katakan pada bagian awal tulisan ini bahwa Jepang masih ada di Palembang, meskipun mereka sudah menyerah kepada sekutu dan Indonesia telah

merdeka, bahkan Jepang tetap merahasiakan kekalahan mereka dari sekutu. Tercatat dalam sejarah para pemimpin Jepang di Palembang terdiri dari Miyako Tosio, Matsubara, Syomubutjo dan Tokkokatjo. Munculnya pemimpin-pemimpin Palembang erat kaitannya dengan peristiwa pemanggilan yang dilakukan oleh pimpinan Jepang di Palembang Miyako Tosio, nampaknya Jepang sudah membaca situasi politik ketika itu, mereka sadar kekuatan mereka di Indonesia ataupun Palembang sudah habis karena mereka sudah kalah dalam perang pasifik. Jepang mempunyai penilaian terhadap tokoh-tokoh Palembang bakal menjadi pemimpin, oleh karena itu Miyato Tosio mengundang sekelompok kecil orang-orang yang dianggap pemimpin Palembang pada tanggal 22 Agustus 1945. Setelah para pemimpin tersebut tiba di rumah pimpinan Jepang nampaknya telah hadir para pembesar Jepang, masing-masing mereka nampaknya habis menangis karena mata mereka merah. Pertemuan itu hanya berlangsung sebentar, nyaris tidak ada pembicaraan apa lagi diskusi. Meskipun kekalahan Jepang terhadap sekutu tidak disebut-sebut, tetapi Jepang meminta kepada segenap pemimpin daerah Palembang agar ikut bersama-sama bertanggung jawab tentang keamanan. Namun para pemimpin Palembang telah dapat memaklumi bahwa Jepang telah kalah terhadap sekutu, mereka harus bertindak cepat untuk mengambil langkah selanjutnya. Para pemimpin Palembang yang hadir adalah Abdul Rozak, Nungcek AR, Raden Hanan, Asaari, Ir. Ibrahim, Baay Salim, H. Cek wan, Salam Painan, Parmono dan Yap Tiang Ho (Kementerian Penerangan RI, 1954: 35).

Nama-nama tersebut di atas mewakili golongan tertentu dalam Hokokai Ciptaan Jepang ketika ia masih berkuasa. Oleh sebab itu wajar Jepang menyebut mereka sebagai pemimpin Palembang ketika itu. Mereka inilah yang disebut elite revolusi, dan orang-orang inilah yang memegang kunci dalam lintasan perubahan-perubahan cepat selama periode empat tahun kemudian yang mengalami pasang surut, jatuh bangun sesuai dengan irama revolusi itu sendiri (Zed, 1991: 232)

Hasil yang didapat dari pertemuan para pemimpin Palembang sebelumnya dengan pimpinan Jepang telah membolatkan tekad tokoh-tokoh Palembang untuk bertindak dan berbuat untuk meneruskan perjuangan guna mengisi kemerdekaan yang dicapai. Mereka segera mengadakan rapat yang dihadiri tokoh-tokoh yang hadir ketika diundang Jepang, mereka sepakat untuk menunjuk dan mengutus Nungcek AR yang ketika itu berumur 39 tahun dari partai Gerindo, untuk datang kembali menghadap Miyako Tosio. Dalam

pertemuan itu sudah barang tentu Nungcek AR mewakili para pemimpin Palembang, untuk itu ia memberikan pernyataan bahwa para pemimpin Palembang bertanggung jawab dalam hal keamanan tetapi mereka menuntut kepada Jepang jaminan terhadap keselamatan segenap pemimpin dan rakyat, dan mengharapkan Jepang untuk tidak bertindak sendiri terhadap situasi yang mungkin terjadi di luar pengetahuan mereka. Yang menarik dari pembicaraan ini Nungcek AR telah nampak lebih berani, mereka menuntut kepada Jepang agar Jepang tidak turut campur dalam kemerdekaan Republik Indonesia karena masalah ini menjadi persoalan bangsa Indonesia sendiri bangsa Jepang tidak boleh menghalang-halangi (Kementerian Penerangan RI, 1954: 36).

Agresifitas para pemimpin Palembang nampak jelas, siang hari mereka di panggil pemimpin Jepang, malam harinya tanggal 22 Agustus 1945 mereka telah mengadakan pertemuan di rumah Dr. A.K. Gani, ketika itu berumur 40 tahun ia adalah seorang dokter swasta yang aktif sebagai anggota partai Gerindo. Keputusan terpenting dari pertemuan ini adalah, mereka sepakat untuk memulai mengoper beberapa kekuasaan dalam pemerintahan. Untuk itu sejak tanggal 24 sampai 25 Agustus 1945 telah dirumuskan susunan pemerintahan bangsa Indonesia sebagai berikut: 1. Dr. A.K. Gani (kepala pusat pemerintahan). 2. Abdul Rozak (sekretaris). 3. R.M. Mursodo (bagian kepolisian). 4. Asaari (bagian kepolisian). 5. Nungcek A.R (kepala bagian penerangan). 6. Dr. M. Isa (kepala bagian industri/tambang). 7. RZ. Fanani (kepala bagian sosial). 8. Ir. Ibrahim Zahir (kepala urusan kemakmuran). 9. Mr. A. Sidik (kepala urusan pengadilan). 10. Baay Salim (kepala urusan pengadilan). 11. H. Cikwan (kepala urusan agama). 12. Raden Hanan (wali kota Palembang). 13. Mr. R.M. Utoyo (kepala urusan pos dan telegram) (Hanafiah, 1998: 209).

#### PERKEMBANGAN ELITE POLITIK

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah awal dari perjuangan bangsa untuk menuju ke arah pemerintahan yang lebih baik. Lazimnya negara yang baru merdeka, tentunya alat perlengkapan negarapun beserta perangkatnya belum lengkap bahkan belum ada. Untuk itulah sangat wajar di Palembang muncul elite-elite politik baru dalam menata kehidupan bernegara. Pada bagian ini penulis akan mencoba menguraikan kelompok-kelompok elite politik yang berpengaruh, dalam pemerintahan di Palembang. Ketika pemerintahan

Republik Indonesia (RI) baru berdiri, wilayah RI dibagi dalam 8 Provinsi. Palembang tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berkedudukan di Medan dengan Gubernur Mr. Teuku Mohammad Hasan. Dalam perkembangannya, Provinsi Sumatera dibagi dalam 3 sub Provinsi, yaitu sub Provinsi Sumatera Selatan, sub Provinsi Sumatera Tengah dan sub Provinsi Sumatera Utara, masing-masing sub Provinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinasi dari kresidenan dan jawatan-jawatan pemerintah yang ada di dalam wilayahnya. Untuk Sumatera Selatan yang terpilih menjadi Gubernur Muda adalah Dr. A.K. Gani. Dalam upaya menjalankan tugasnya, ia banyak dibantu rekan-rekannya sendiri seperti Dr. M. Isa, Ahmad Najamudin dan Abdul Rozak. Bidang pertahanan dan keamanan dibantu tokoh-tokoh seperti Hasan Kasim, Dr. Ibnu stuwu, Abi Hasan Said dan Bambang Utoyo (Sindapati, 1997: 3).

Mr. Teuku Mohammad Hasan adalah Gubernur Sumatera pertama, pengangkatan ini berdasar dari ketetapan Presiden Soekarno tanggal 13 September 1945 tentang susunan pemerintahan Republik Indonesia, termasuk Gubernur seluruh Indonesia. Pengangkatan ini tentunya menimbulkan kecemburuan dari tokoh-tokoh lain terutama Dr. A.K. Gani. Gani menilai perjuangan di tingkat Sumatera lebih menonjol di daerah Sumatera Selatan ketimbang Sumatera Utara. Dr. A.K. Gani meskipun berasal dari Sumatera Barat, karir perjuangan politiknya banyak di Sumatera Selatan. Protes yang dilakukan oleh A.K. Gani sudah barang tentu bentuk kekecewaannya, ia sangat berambisi dalam persaingan merebut kepemimpinan di Sumatera. Sampai saat ini nama DR. A.K.Gani tidaklah asing bagi rakyat Sumatera Selatan terutama kota Palembang, selain punya rumah sakit A.K. Gani orang Palembang punya museum A.K. Gani.

Dalam usaha pembentukan badan-badan pemerintahan di Palembang sejak awal kemerdekaan serta usaha penyelesaian perselisihan Indonesia dengan Belanda, nama DR.A.K.Gani dan DR.M. Isa banyak menghiasi bunyi surat-surat keputusan pemerintah. Meskipun ia tidak terpilih menjadi Gubernur Sumatera yang kebetulan ketika itu A.K.Gani sedang sakit, namun Soekarno memahami apa yang dikehendaki A.K.Gani, Soekarno mengangkat A.K. Gani menjadi Residen Palembang tanggal 25 September 1945. Selain kedua tokoh ini terdapat elite lain yang bernama Abul Rozak, nama ketiga elite ini saling mengisi dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan di Palembang. Pada waktu A.K. Gani diangkat menjadi kepala pusat pemerintahan di Palembang, sebagai wakilnya ditunjuk

Abdul Rozak. Kemudian dengan dibentuknya pemerintahan keresidenan Palembang pada bulan Oktober 1945, A.K. Gani menjadi residennya dan Abdul Rozak sebagai wakil. Sejak pengangkatan A.K. Gani Gubernur Muda Sumatera Selatan jabatan residen dipegang oleh DR. M. Isa, dan ketika A.K.Gani menjadi Menteri Kemakmuran kedudukan Gubernur Muda dipegang oleh Dr. M.Isa jabatan residen diserahkan kepada Abdul Rozak (Kementerian Penerangan RI, 1954: 54).

Perjuangan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dapat dikatakan berhasil, salah seorang elite yang berjasa adalah Hasan Kasim, ia termasuk salah seorang perwira Gyugun yang memelopori pertemuan yang membahas teknis penjagaan keamanan dan ketertiban di daerah Palembang. Pada pertemuan tanggal 4 September 1945 telah dibentuk dan diresmikan berdirinya Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR). Dalam perkembangan selanjutnya, BPKR disusun lagi agar lebih sesuai dengan badan resmi yang dibentuk pemerintah pusat, yaitu menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini dipimpin oleh Hasan Kasim. Hasan Kasim seorang elite yang mempunyai dedikasi dengan berbagai usaha-usahanya untuk kemajuan kemiliteran, meskipun kekuatan bersenjata sudah terbentuk melalui wadah awal angkatan bersenjata yaitu BKR, namun belumlah mempunyai kekuatan yang berarti, anggota-anggotanya hanya dari pemuda yang tidak mempunyai pengalaman berperang dan belum pernah mendapat pendidikan kemiliteran, kecuali para Gyugun ataupun Hieho. Berdasarkan pada kenyataan, dirasakan perlu adanya latihan dan pendidikan kemiliteran bagi para anggota BKR. Hasan Kasim selaku ketua BKR segera mengambil langkah-langkah untuk membuka tempat-tempat pendidikan dan latihan kemiliteran yaitu di Bukkit Besar (Perwiranegara, 1987: 20-21).

Perjalanan sejarah di Palembang diwarnai dengan berdirinya negara federal yaitu Negara Sumatera Selatan (NSS). Negara ini berdiri tanggal 30 Agustus 1948 dan bubar tanggal 18 Maret 1950. Berdirinya Negara Sumatera Selatan tidak terlepas dari dukungan kelompok masyarakat yang melihat kesempatan dalam NSS untuk tampil menjadi pemimpin yang di bawah Republik sulit dicapai. Para pendukung itu menurut Recomba (Regeerings commissaris voor bestuurs Aangelegenheden-komisaris negara urusan pemerintahan sipil Belanda) dengan pimpinan Wijnmalen, terdiri dari kelompok Raden yaitu anggota keluarga terkemuka dari kesultanan Palembang. Tokoh-tokohnya antara lain Raden Hanan, Raden Mohammad Akip dan Raden Sulaiman. Suatu hal yang dapat diharapkan Belanda dalam

mendukung politik federal adalah mentalitas kedaerahan. Mereka tidak senang terhadap pengaruh yang sangat besar dari elite-elite yang berasal dari “luar daerah” Palembang yang menguasai kekuasaan.

Sejak masa kesultanan kelompok raden mengorganiser diri di bawah suatu perkumpulan bernama Angkatan Pemuda Sriwijaya (APS) (Sevenhoven, 1997: 26). Organisasi ini bertujuan memperkuat rasa persaudaraan di antara pemuda-pemuda di kota Palembang khususnya dari keluarga keturunan kesultanan Palembang. Namun sangat disayangkan organisasi ini kekurangan tokoh-tokoh pemimpin yang formal, dan hubungan mereka dengan daerah pedalaman tidak ada.

Pada tahap-tahap awal kemerdekaan eksistensi kelompok raden kurang berarti, mereka seakan-akan kehilangan induk semang karena Belanda tidak berkuasa lagi di Indonesia. Namun perjalanan sejarah Indonesia terus berkembang seperti kedatangan Belanda untuk kedua kali di Indonesia. Dengan sendirinya terbuka kembali hubungan dengan Belanda, mereka sudah berani menunjukkan sikap penolakan terhadap dominasi elite daerah lain terutama elite politik dari Jawa dan Minang yang berperan di awal pembentukan Republik di Palembang. Untuk itu guna membangkitkan kembali semangat penduduk, Belanda meningkatkan kembali hubunggan dengan kelompok raden yang menunjukkan sikap setia kepada Belanda. Bagi Belanda kerjasama dengan golongan ini sangat diperlukan untuk perkembangan politik dan pemerintahan yang Belanda perjuangkan di Sumatera Selatan. Sementara itu, bagi kelompok raden kerjasama dengan bangsa Belanda dianggap penting dan dapat menguntungkan. Pada masa ini periode revolusi yang kacau, sebagian besar kelompok raden lebih banyak menunjukkan keragu-raguan dan ketakutan terhadap masa depan politik yang menurut mereka masih belum pasti . Karena itu sikap penyerahan diri dan dengan mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Belanda yang dapat melindungi mereka serta membuat mereka merasa aman (Algemeene Secretarie Archeif 1942-1950. Mikro Film No 3144).

Setelah Belanda berhasil menduduki kota Palembang dengan jalan melancarkan peperangan pada awal bulan Januari 1947, dan disusul dengan melakukan agresi militer pertama tanggal 21 Juli 1947, maka pemerintah kolonial Belanda mulai merekayasa pembentukan negara federal di Sumatera Selatan. Program ini dipercayakan kepada

pemerintah sipil Belanda yang bertugas di Palembang yaitu Mr. H.J. Wijnmalen. Untuk merealisasikan program itu, Wijnmalen mulai melancarkan aksi dengan mendekati orang-orang yang dianggap mampu mendukung usahanya.

Bangsa Belanda yakin bahwa gerakan federal akan mendapat sambutan yang meluas di kalangan penduduk Sumatera Selatan umumnya dan di kota Palembang pada khususnya. Wijnmalen mulai mengambil langkah-langkah yang tepat dengan melancarkan propaganda, guna memotong kesetiaan penduduk kepada Republik yang berpusat di Yogyakarta. Wijnmalen mengadakan pertemuan dengan para pemuka masyarakat di kota Palembang, rakyat mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan status yang mereka inginkan dalam struktur politik federal di Palembang.

Salah seorang elite politik yang paling senior dari kelompok Raden dan paling diharapkan kerjasamanya oleh Belanda adalah Raden Hanan. Tidak hanya dikenal sebagai tokoh di kalangan keluarga raden namun ia juga sebagai pemimpin Republik Indonesia. Raden Hanan pernah memegang posisi penting, selaku wali kota Palembang pada masa Jepang, jabatan ini masih berlanjut sampai awal Republik. Pada masa pendudukan Belanda Raden Hanan kembali diangkat Belanda menjadi wali kota dalam mereorganisasi kota praja Palembang di bawah Recomba sejak bulan Juli 1947, tetapi ia mengundurkan diri pada tanggal 21 Agustus 1947. Sebab-sebab pengunduran Raden Hanan dari jabatan wali kota Recomba dapat dikemukakan menurut alasan Belanda adanya ketakutan Raden Hanan terhadap pembalasan penduduk yang radikal mengingat banyak anggota keluarganya yang tinggal di Palembang. Alasan ini boleh jadi propaganda Belanda yang kecewa terhadap tokoh yang mereka harapkan. Pengunduran Raden Hanan berkaitan dengan sikap politik yang menolak semua bentuk kerja sama dengan Belanda (Micro Filem, No. 3144).

Pengunduran Raden Hanan sekaligus telah membuka pikiran Wijnmalen yang menyamaratakan semua orang yang bergelar raden dapat bekerja sama dengan Belanda dalam politik federalnya. Oleh sebab itu Wijnmalen mulai berpaling kepada anggota kelompok raden yang lain, seperti Raden Sulaiman yang memiliki perhatian bagi kebutuhan propaganda yang intensif di kalangan penduduk kota Palembang. Propagandanya dapat dikatakan berhasil, sebagian besar penduduk tidak menolak bekerja sama dengan Belanda. Melalui pidato-pidatonya pada setiap pertemuan Raden Sulaiman mulai menanamkan rasa



keinsyapan terhadap penduduk kota menurut versi gerakan Negara Sumatera Selatan. Bagi Raden Sulaiman penduduk Palembang menginginkan kehidupan yang tenang, tetapi syarat utama untuk ini menyingkirkan para propaganda Republik Indonesia di Palembang yang berorientasi dengan pemerintah pusat di Yogyakarta (Catatan Recomba Sumatera selatan, tanggal 19 September 1947).

Elite politik yang lain dari kelompok raden adalah Raden Mohammad Akip, ia adalah ketua muda dan anggota pengurus harian gerakan daerah istimewa Sumatera Selatan. Pada waktu koferensi negara federal di Bandung tanggal 27 Mei 1948, R.M. Akip termasuk salah seorang delegasi Sumatera Selatan. Menurut sumber Belanda R.M Akip banyak menunjukkan pengertian bagi usaha-usaha politik federal Belanda, tetapi tidak berani mengungkapkan simpatinya pada situasi baru ini. Karena kesetiaannya kepada Belanda, Raden Mohammad Akip diangkat menjadi Direktur Pekerjaan Umum (PU) kota praja Palembang di bawah Recomba (Micro Filem, No. 3144).

Elite lain yang berperan pada masa revolusi terutama pada politik federal yang dilancarkan Belanda adalah Abdul Malik. Ia adalah elite politik yang berhasil didekati Belanda dalam memuluskan tujuannya yaitu mendirikan negara federal dengan nama Negara Sumatera Selatan, Abdul Malik terpilih menjadi wali negara. Abdul Malik sebetulnya bukan dari keturunan raden, ia lahir di Sekayu pada tanggal 23 September 1912. Sebelum menjadi wali negara NSS ia menjadi guru baik di Palembang maupun di luar Palembang yaitu di Pontianak. Karir ini sangat cocok dengan pendidikan yang ia peroleh, setelah tamat Sekolah Rendah, ia melanjutkan ke Sekolah Guru (Kweekschool) di Medan dan Bukit Tinggi. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Tinggi di Bandung dan Magelang (Pelita, 6 Desember 1948). Bekal pendidikan yang ia peroleh, telah menghiasi garis kehidupannya, karena itu sebagian besar masa hidupnya diabdikan pada profesi guru. Tugas ini masih ia tekuni sampai awal kemerdekaan, bahkan menjadi kepala Perguruan keagamaan di Palembang.

Awal mula keterlibatan Abdul Malik dalam Negara Sumatera Selatan sejak ia bergabung dengan badan persiapan Negara Sumatera Selatan untuk mempersiapkan pembentukan daerah istimewa Sumatera Selatan. Setelah itu karir Abdul Malik terus menanjak hingga meraih posisi penting, seperti menjadi ketua Dewan Penasehat Sumatera

Selatan tanggal 6 April 1948. Meskipun Abdul Malik bukan dari kelompok raden, orang seperti Malik justru diperlukan Belanda untuk menjadi penghubung berbagai kepentingan dalam anggota dewan, dan dapat menandingi propaganda Republik yang tetap aktif menghalang-halangi kegiatan kaum federalis yang ketika itu belum berhasil mengikat suatu organisasi yang kuat. Berbagai kegiatan terhambat karena kekurangan tenaga dalam mendukung rencana Belanda. Tampilnya Abdul Malik sebagai ketua dewan dapat diharapkan memainkan peranan penting untuk menjembatani kepentingan Belanda dengan pihak Republik (Micro Filem, No. 3141).

Recomba Sumatera Selatan bukan tidak menyadari bahwa Abdul Malik seorang yang sudah lama dianggap tidak punya prinsip, berambisi untuk memperoleh kedudukan dan dengan senang hati melayani Belanda demi mencapai kedudukan tersebut (Kahin, 1995: 488). Karena pengabdianya yang serius kepada pemerintah Belanda, Abdul Malik diberi kesempatan menjadi anggota delegasi Indonesia untuk menghadiri konferensi Unesco di Mexico pada bulan Oktober 1947. Setelah itu Abdul Malik melakukan perjalanan peninjauan ke Curacao, Suriname dan Amerika Serikat, dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Abdul Malik mengunjungi negara Belanda dan menghadiri konferensi kerajaan sebagai peninjau (Pelita, 6 Desember 1948).

Ketika diadakan konferensi negara federal di Bandung pada tanggal 27 Mei 1948, Abdul Malik menjadi pimpinan delegasi Sumatera Selatan, dan juga diangkat wakil daerah Palembang dalam perundingan federal istimewa. Kedudukan wakil Sumatera Selatan dalam konferensi itu adalah sebagai peninjau. Raden Mohammad Akip menjelaskan bahwa, setelah konferensi ini akan diadakan tindakan guna pembentukan Negara Sumatera Selatan (Koleksi Anri, No. 15121 dan Pelita, tanggal 28 Desember 1948).

Sementara itu dalam pidato Abdul Malik yang disiarkan melalui radio yang isinya dikutip harian Pelita tanggal 1 April 1949. Pidato itu disampaikan dalam acara pertemuan antara golongan federalis dan golongan Republik, yang dikenal dengan konferensi Sumatera di Medan pada awal April 1949, Abdul Malik mengatakan fihaknya kelompok federalis bersedia bersahabat dengan kaum Republik. Abdul Malik mengajak untuk bersama-sama mengambil sikap yang patut dan saling mengerti, agar dapat membuka jalan untuk mempertimbangkan dan merundingkan salah paham selama ini. Selanjutnya Abdul Malik

menyampaikan agar kaum Republik tidak melihat dengan sikap yang berat sebelah. Jika demikian, antara kaum federalis dan Republik selalu akan ada perpecahan, semua usaha untuk mengadakan persatuan akan kami junjung (Pelita, 1 April 1949).

## PENUTUP

Periode tahun 1945-1950 banyak dikatakan orang masa revolusi, priode kacau dan masa menata kehidupan yang lebih baik. Pada saat itu, elite politik yang mubangsa Indonesia baru saja menyetakan kemerdekaan yang berarti babak baru perjalanan suatu bangsa. Keberadaan elite politik menunjukkan dinamika sejarah yang digerakan oleh golongan-golongan sosial yang melihat kesempatan dalam memegang kekuasaan. Elite-elite politik yang muncul di antaranya DR. A.K. Gani, DR. M. Isa, Abdul Rozak, M. Kasim mereka inilah yang berperan dalam poltik dan pemerintahan pada masa revolusi. Selain itu terdapat elite-elite politik dari kelompok raden, mereka adalah Raden Hanan, Raden M. Akip, Raden Sulaiman. Serta Abdul Malik, elite politik yang bukan dari kelompok Raden. Mereka ini berkerjasama dengan bangsa Belanda dalam mendirikan negara federal yaitu Negara Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alian. 2000. *Negara Sumatera Selatan Dalam Konflik Elite Politik Lokal (1948-1950)*. Tesis.

Program Pasca Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Hanafiah, djohan (Editor). 1998. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya*

*Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II.

Kahin, George MC Turnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. (Terjemahan).

Sebelas Maret University Press Bekerjasama dengan pustakan Sinar Harapan.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1954. *Sejarah Propinsi Sumatera Selatan*.

Masyhur M, Amin. 1988. *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*.

Jakrta: Pustaka Grafika Kita

Perwiranegara, Ratu H. Alamsyah. 23 Februari 1985. *Bahan Ceramah garis-Garis*

*Besar Sejarah Perjuangan Rakyat Sumatera Bagian Selatan Pada Masa Perang Kemerdekaan.* Penyelenggara Universitas Sriwijaya.

Sevenhoven, J.L. van. 1971. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang.* (Terjemahan).

Jakarta: Bhratara

Sindapati. A.K. 1987. *Patriotisme dan Heorisme Dalam Perang Kemerdekaan*

*Tahun 1945-1950 di Bumi Sriwijaya.* Palembang: Tanpa Penerbit.

Van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia.* Bandung: Pustaka Jaya

Zed, Mestika. 1951. *Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950.* Desrtasi

Doktor. Amsterdam: Vrije Universiteit Central Huisdrukkerij VU

#### SUMBER ARSIP

Algemeene Secretarie Archief 1942-1950. Micro Film No. 3141 dan No. 3144.

Algemeene Secretarie Archief 1942-1950. Bundel 1292. Agenda 15 Juni 1948

Np. 15121/AGSU 9

#### SURAT KABAR

Pelita tahun 1948 dan 1949